

NAMA MEDIA : Jawa Pos
TANGGAL : 25 Oktober 2023
KATEGORI : Hukum Tata Negara

Lima Provinsi Rawan Politik Uang

Bawaslu RI Sebut Masuk Kategori Tinggi

JAKARTA - Hari H Pemilu 2024 kian dekat. Tinggal 183 hari. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pun telah menuntaskan pemetaan potensi kerawanan. Salah satunya politik uang (*money politics*). Hasil analisis tematik Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), dari 34 provinsi, setidaknya ada lima provinsi yang masuk kategori kerawanan tinggi.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengungkapkan, lima provinsi itu adalah Maluku Utara di posisi puncak dengan skor 100 poin. Disusul Lampung (55,56), Jawa Barat (50,00), Banten (44,44), dan Sulawesi Utara (38,89). Penghitungan poin mengacu sejumlah indikator. Di antaranya, kasus politik uang di pemilu sebelumnya serta modus dan karakteristik pelaku.

Meski hanya lima provinsi yang masuk kategori rawan tinggi, bukan berarti daerah lain tidak rawan. Bawaslu mencatat 29 provinsi lainnya masuk dalam kategori rawan sedang. "Tidak ada provinsi yang masuk kategori rawan rendah politik uang," ucapnya.

IKP tersebut memberi gambaran bahwa politik uang menjadi fenomena umum. Terjadi di semua wilayah Indonesia, dengan derajat dan gradasi kasus yang berbeda. Fakta itu menjadi tantangan bersama, terutama Bawaslu. Selain persoalan regulasi, penegak hukum juga dihadapkan pada kultur masyarakat. Mereka menganggap praktik politik uang sebagai hal yang biasa terjadi.

Di tingkat kabupaten/kota, situasinya tak jauh berbeda. Tidak ada satu pun kabupaten/kota yang masuk kategori rendah indeks kerawanan politik uang. Dari 514

Tidak ada provinsi yang masuk kategori rawan rendah politik uang."

LOLLY SUHENTY
Anggota Bawaslu RI

kabupaten/kota yang dianalisis, sebanyak 24 kabupaten/kota masuk kategori rawan tinggi. Posisi teratas diduduki Kabupaten Jayawijaya (100), Banggai (69,49), Banggai Kepulauan (72,86), Sekadau (67,80), dan Kabupaten Lampung Tengah (47,46). "Sebanyak 490 kabupaten/kota sisanya masuk kategori kerawanan sedang terjadinya praktik politik uang," jelasnya.

Saat menyampaikan sambutan dalam Pidato Kebudayaan Prof KH Said Aqil Siroj di Gedung Joeang 45, Jakarta, Jumat (11/8) malam, Ketua Umum DPP PKB

Muhaimin Iskandar juga menyinggung politik uang. "Entah yang dalam manajemen politik nasional kita, entah kita punya keterbatasan di berbagai hal dalam kewarganegaraan," ujarnya.

Yang jelas, lanjut Muhaimin, persaingan politik dalam pemilu 2-3 periode terakhir menunjukkan bahwa kompe-

tisi yang menghalalkan segala cara telah berjalan di lapangan dengan sangat terbuka. "Apa yang disampaikan Kiai Said dengan *money politics*, yang kaya yang berkuasa, yang menyang punya duit, itu terbukti di lapangan dengan baik," katanya.